

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Beasiswa

1. Definisi Beasiswa

Beasiswa adalah pemberian bantuan keuangan kepada individu yang bertujuan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan yang sedang ditempuh.¹ Menurut Noviyanti dan Dermawan menyatakan bahwa beasiswa merupakan bentuk dukungan dana pendidikan yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi.² Ini diperkuat oleh pratiwi dan wibowo Beasiswa adalah pemberian bantuan keuangan kepada individu yang bertujuan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan yang sedang ditempuh. Laila menambahkan bahwa beasiswa

¹ Arswendi Perdana dkk, "Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerima Beasiswa Berprestasi Pada Yayasan Pendidikan Jaya Untuk Anak Karyawan Dengan Menerapkan Metode ORESTE dan ROC (Rank Order Centroid)," *Journal of Machine Learning and Data Analytics (MALDA)*, Volume 01, (Januari 2022), hlm 17.

² Rejeki Noviyanti dan Dodik Arwin Dermawan, "Studi Literatur Pengaruh Beasiswa Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa, *Jurnal IT-EDU*, Volume 07, (Agustus 2022), hlm 59.

merupakan dukungan finansial yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah kepada mahasiswa, baik sebagai bentuk penghargaan atas prestasi akademik maupun sebagai bantuan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi.³ Didukung pernyataan Pratiwi dan Wibowo bahwa Beasiswa berasal dari universitas, kedutaan, pemerintah, lembaga non-pemerintah, atau institusi lainnya, dan juga menjadi kesempatan bagi penerima untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya melalui jalur pendidikan.⁴

Dapat dipahami bahwa beasiswa merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada individu untuk mendukung keberlangsungan pendidikan yang sedang ditempuh. Bantuan ini dapat berasal dari universitas, pemerintah, lembaga non-pemerintah, atau institusi lain, dan berfungsi sebagai dukungan finansial sekaligus

³ Asa'aro Laila dkk, "Mekanisme dan Persyaratan Beasiswa Daerah", *Jurnal Abdimas Mutiara*, Volume 2, (Maret 2022), hlm 226.

⁴ Qori Alfina Pratiwi dan Jati Sasongko Wibowo, "Sistem Pendukung Seleksi Penerima Beasiswa dengan Metode Naïve Bayes Classifier," *Jurnal Elektronika dan Komputer*, Volume 16, (Juli 2023), hlm 157.

kesempatan bagi penerima untuk meningkatkan kapasitasnya melalui jalur pendidikan.

2. Bentuk Beasiswa

Beasiswa merupakan bentuk bantuan pendidikan yang diberikan untuk mendukung keberlangsungan studi seseorang, baik dalam bentuk pembiayaan maupun fasilitas penunjang. Dalam pelaksanaannya, beasiswa memiliki beragam bentuk sesuai dengan kebijakan lembaga pemberi. Menurut Setiawati dan Sukarno bentuk beasiswa umumnya terbagi menjadi beasiswa penuh (*full scholarship*), beasiswa sebagian (*partial scholarship*) atau bantuan fasilitas tertentu saja yang menunjang pembelajaran.⁵ Hal ini sejalan dengan Muthaimainnah dan Rahmad mengatakan bahwa beasiswa itu ada beasiswa penuh (*full scholarship*), beasiswa sebagian (*partial scholarship*).⁶ Beasiswa penuh merupakan jenis beasiswa

⁵ Nur Amega Setiawati dan Sabar Sukarno, "Tinjauan Beasiswa Uang Kuliah Tunggal dan Motivasi Belajar di Perguruan Tinggi Swasta," *In Journal Fascho in Education Conference Proceedings*, Volume 2 (Desember 2021), hlm 4.

⁶ Venni Nabila Farah Muthmainnah dan Masduki Ahmad, "Pengaruh Beasiswa Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMAIT Buahhati Islamic

yang seluruh biaya pendidikannya ditanggung oleh pihak sponsor atau penyedia program beasiswa, sementara beasiswa sebagian adalah beasiswa yang hanya menanggung sebagian dari kebutuhan penerima, biasanya hanya mencakup biaya tertentu seperti biaya hidup, sedangkan kebutuhan lainnya masih harus dipenuhi oleh penerima beasiswa dari dana pribadi.⁷

Dapat disimpulkan bahwa bentuk beasiswa itu ada beasiswa penuh dan beasiswa sebagian, di mana beasiswa penuh menanggung seluruh biaya pendidikan penerima, sedangkan beasiswa sebagian hanya menanggung sebagian kebutuhan, seperti biaya hidup atau biaya tertentu, sementara kebutuhan lain tetap menjadi tanggungan penerima. Selain itu, beasiswa juga dapat diberikan dalam bentuk fasilitas penunjang pendidikan yang membantu keberlangsungan studi.

School", *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 9, No 1, (2023), hlm 130.

⁷ Venni Nabila Farah Muthmainnah dan Masduki Ahmad, "Pengaruh Beasiswa Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMAIT Buahhati Islamic School", *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 9, No 1, (2023), hlm 130.

3. Tujuan Beasiswa

Sebelum membahas tujuan secara rinci, perlu dipahami bahwa beasiswa tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan akses pendidikan, mendukung kelangsungan studi, dan mengembangkan potensi peserta didik. Dengan berbagai bentuk dan mekanisme yang ada, beasiswa memberikan kesempatan bagi penerima untuk meningkatkan kemampuan akademik dan kapasitas diri melalui jalur pendidikan yang ditempuh.

Massapeary menyatakan bahwa tujuan utama pemberian beasiswa, yaitu sebagai berikut:⁸

- a. Mendorong semangat belajar dan pencapaian akademik siswa.
- b. Memperluas akses pendidikan serta memberikan peluang pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi.

⁸ Dedi Kuswanto dan Nurus Saadah, “Efektivitas Program Beasiswa Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik SMP Nu Darul Ma’Akrif”, *Jurnal Pendidikan Bimbingan Konseling Islam*, Volume 3, (Agustus 2022), hlm 29.

- c. Menjamin keberlanjutan pendidikan bagi penerima manfaat
- d. Meningkatkan capaian akademik siswa di berbagai bidang pendidikan
- e. Memberikan pengaruh positif yang memotivasi peserta didik untuk terus meraih prestasi lebih baik.
- f. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif, serta memiliki rasa kepedulian sosial sehingga dapat berkontribusi dalam mengurangi rantai kemiskinan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemberian beasiswa memiliki tujuan strategis, yaitu tidak hanya sebagai bantuan finansial, tetapi juga untuk mendorong motivasi belajar, meningkatkan capaian akademik, dan mencetak lulusan yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

B. Konsep Orang Tua Asuh

Orang tua asuh yang dijelaskan dalam regulasi pemerintah dalam Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang

Pengasuhan Anak, dijelaskan bahwa orang tua asuh adalah orang tua selain keluarga atau orang tua tunggal yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara.⁹ Selanjutnya, dalam Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, dijelaskan bahwa orang tua asuh adalah suami istri atau orang tua tunggal selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara.¹⁰

Menurut Hazriyanti, Nurjanah, dan Murniyetti, Orang tua asuh merupakan dapat berasal dari perorangan, keluarga, atau anggota masyarakat yang berperan layaknya orang tua dengan menyediakan biaya pendidikan atau fasilitas belajar, sehingga anak tersebut dapat mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan dasar sebagai bagian dari program wajib

⁹ Endria Hanni Ananad, “Kajian Yuridis Terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orangtua Asuh Di Pati Jawa Tengah”, *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, Volume 3, (Agustus 2023), hlm 108.

¹⁰ Endria Hanni Ananad, “Kajian Yuridis Terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orangtua Asuh Di Pati Jawa Tengah”, *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, Volume 3, (Agustus 2023), hlm 108.

belajar.¹¹ Sementara itu, Jemimut dan Iswahyudi menegaskan bahwa orang tua asuh adalah individu yang berperan dalam merawat dan mengurus anak yatim, selain itu mereka juga berperan dalam pembinaan moral anak-anak asuh, termasuk memberikan bekal keagamaan serta arahan yang sesuai dengan nilai-nilai agama.¹²

Maksud dari orang tua asuh adalah individu, pasangan, atau keluarga selain orang tua biologis yang diberi kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak secara sementara. Peran orang tua asuh mencakup penyediaan biaya pendidikan dan fasilitas belajar, pembinaan moral, serta bimbingan keagamaan, sehingga anak dapat mengikuti pendidikan formal dan tumbuh dengan nilai-nilai sosial dan agama yang baik. Dalam konteks program Beasiswa Orang Tua Asuh, peran orang tua asuh difokuskan sebagai penyedia

¹¹ Irma Hazriyanti dkk, "Peran Orangtua Asuh Dalam Pembentukan Akhlak Anak," *n-Nuha: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 4, (Agustus 2024), hlm 285.

¹² Yustina Jemimut dkk, "Peranan Orang Tua Asuh Dalam Pembinaan Moral Anak Usia Remaja Di Panti Asuhan", *In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan*, Volume 3, (Desember 2019), hlm 103-104.

dana atau donasi untuk pendidikan anak. Melalui program ini, anak-anak yang diasuh mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan formal, termasuk pendidikan dasar hingga menengah, serta memperoleh fasilitas penunjang belajar. Dengan demikian, beasiswa yang diberikan oleh orang tua asuh tidak hanya meringankan beban finansial, tetapi juga berperan dalam pengembangan potensi akademik, moral, dan sosial anak, selaras dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai.

C. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tahap penting dalam proses kebijakan, karena pada tahap ini suatu kebijakan yang telah dirumuskan diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata di lapangan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Firdaus dan Widayarta, istilah implementasi kebijakan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi di bawah arahan sektor publik maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan

sebelumnya.¹³ Tahap implementasi baru dapat dimulai setelah tujuan dan rekomendasi disepakati atau ditetapkan melalui keputusan kebijakan.

Menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan adalah proses yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, serta prosedur dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.¹⁴

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif apabila tujuan dan ukuran kebijakan dipahami secara jelas oleh para pelaksana. Oleh karena itu, informasi terkait kebijakan harus disampaikan secara tepat, konsisten, dan mudah dipahami. Komunikasi

¹³ Diva Ayu Pratiwi Firdaus dan Agus Widiyarta, "Implementasi Kebijakan Beasiswa Pemuda Tangguh Dalam Mendorong Peningkatan Kualitas Pendidikan," *Journal Publicuho*, Volume 7, (November 2024), hlm 2312.

¹⁴ Ahmad Fauzan, "Model Implementasi Kebijakan Publik," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 4, (Juni 2024), hlm 1734-1736.

yang tidak jelas dapat menimbulkan perbedaan interpretasi di antara pelaksana, sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan. Selain itu, kurangnya komunikasi juga dapat menyebabkan kebingungan mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaksana.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, dana, informasi, kewenangan, serta sarana dan prasarana. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah maupun kualitas, dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya yang baik agar program dapat berjalan secara optimal. Selain itu, ketersediaan informasi yang memadai juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana berkaitan dengan komitmen, kejujuran, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Sikap pelaksana yang mendukung kebijakan akan mendorong keberhasilan implementasi, sedangkan sikap yang tidak mendukung dapat menjadi penghambat. Pelaksana yang memahami tujuan kebijakan tetapi tidak memiliki komitmen yang kuat berpotensi tidak melaksanakan kebijakan secara optimal. Oleh karena itu, dukungan dan keseriusan dari pelaksana sangat diperlukan dalam mencapai tujuan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan sistem organisasi, prosedur kerja, serta pola hubungan dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur yang jelas dan terorganisir dengan baik akan memudahkan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, struktur birokrasi yang tidak efektif dapat menghambat proses implementasi, terutama dalam kebijakan yang melibatkan

banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan adanya standar operasional prosedur (SOP) serta sistem koordinasi yang baik agar kebijakan dapat berjalan dengan optimal.

D. Teori Pengasuhan

1. Definisi Pengasuhan

Secara etimologi, pengasuhan berasal dari kata "asuh" yang artinya pemimpin, pengelola, pembimbing. Menurut Yusuf dkk mengasuh adalah membimbing yang dilakukan terhadap anak yang berkaitan dengan kepentingan hidupnya¹⁵ Menurut Baumrind Pengasuhan merupakan proses interaksi orang tua dengan anak dalam memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis, serta menanamkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat sehingga dapat memengaruhi perilaku individu.¹⁶ Dalam Penelitian Darmawati dan Maisaroh Pengasuhan dalam definisi Islam tidak

¹⁵ Wa Ode Yahyu Herliany Yusuf dkk, "Pengasuhan Ideal Bagi Generasi Alpha", , *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negeri*, Volume2, (Februari2024), Hlm 36.

¹⁶ Aning Tri Subeqi dan Isbandi Rukminto Adi, "Pengalaman Pengasuhan Dan Dukungan Keluarga Sebagai Prediktor Dalam Subjective Well Being Kepala Keluarga," *Jurnal Keluarga Berencana*, Volume 7, (2022), Hlm 3.

hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga pendidikan moral, spiritual, dan intelektual. Ini melibatkan pengajaran nilai-nilai agama, pembentukan karakter, serta pemeliharaan lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal anak.¹⁷

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengasuhan merupakan proses membimbing, mendidik, dan membina anak yang dilakukan oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, moral, spiritual, dan intelektual anak. Pengasuhan juga bertujuan menanamkan nilai, norma, dan karakter agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan lingkungan dan ajaran yang berlaku.

¹⁷ Dini Darmawati dan Rizkiya Maisaroh, "Konsep Pengasuhan Dalam Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Untuk Anak Usia," Jurnal Adzkiya, Volume VIII, (Juni 2024), Hlm 11.

2. Macam-macam Pengasuhan

Menurut Hurlock yang dikutip Yusuf bahwa terdapat tiga jenis pola pengasuhan, yaitu pola asuh permisif, pola asuh otoriter, dan pola asuh demokratis.¹⁸

a. Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif merupakan pola pengasuhan yang memberikan kebebasan penuh kepada anak tanpa pengawasan dan aturan yang ketat. Dalam pola asuh ini, anak dibiarkan menentukan keputusan sendiri tanpa banyak kontrol dari orang tua. Orang tua cenderung hanya berperan sebagai pemberi fasilitas dan kurang memberikan bimbingan maupun komunikasi kepada anak. Akibatnya, perkembangan kepribadian anak dapat menjadi kurang terarah dan anak cenderung mengalami kesulitan ketika menghadapi aturan atau larangan di lingkungan sekitarnya.

¹⁸ Mgr Sinomba Rambe dkk, "Metode Pengasuhan Dalam Pembentukan Karakter Religius Di Panti Asuhan Yatim Putra Islam Yogyakarta," *Urwatul Wutqo: Jurnal Kependidikan dan Keislaman*, Volume 12, (Maret 2023), Hlm 3-5.

b. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter adalah pola pengasuhan yang menekankan aturan dan kedisiplinan yang harus dipatuhi oleh anak. Orang tua menetapkan batasan yang ketat tanpa memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapat. Jika aturan dilanggar, anak biasanya akan diberikan hukuman. Pola pengasuhan ini membuat anak kurang memiliki kebebasan untuk berekspresi dan mengembangkan inisiatif sehingga dapat mempengaruhi rasa percaya diri anak.

c. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis merupakan pola pengasuhan yang memberikan kebebasan kepada anak tetapi tetap disertai dengan pengawasan dan bimbingan dari orang tua. Dalam pola asuh ini, komunikasi antara orang tua dan anak terjalin dengan baik sehingga anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Orang tua juga

memberikan penjelasan secara rasional terhadap aturan yang diterapkan. Melalui pola asuh demokratis, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu bertindak sesuai norma yang berlaku.

E. Teori Pemberdayaan

1. Definisi pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang ditujukan kepada individu, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembangunan, untuk diberikan bantuan dan pendampingan agar mampu hidup mandiri serta mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dijalani.¹⁹ Nasir, menyatakan, pemberdayaan merupakan konsep yang meliputi berbagai tindakan dan strategi untuk meningkatkan kapasitas individu atau

¹⁹ Suryati dan Nazarmato, "Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Non Formal," *Al-Basyar: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 1, (Desember 2022), hlm 72.

kelompok agar dapat berperan aktif dalam kehidupan.²⁰

Sejalan dengan itu, Hamid dikutip Habib, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang masih lemah agar mampu hidup secara mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.²¹

Sementara, Sutikno dikutip Bahri Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat kelompok masyarakat yang saat ini masih belum mampu keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.²² Dari berbagai perspektif mengenai definisi pemberdayaan dapat ditarik kesimpulan bahwa, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian individu atau

²⁰ Moh Nasir dkk., "Strategi Pemberdayaan Sekolah sebagai Upaya Peningkatan Manajemen Pendidikan," *Journal Of International Multidisciplinary Research*, Volume 1, (Desember 2023), hlm 807.

²¹ Muhammad Alhada Fuadilah Habib, "Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif," *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, Volume 1, (November 2021), hlm 83.

²² Efri Syamsul Bahri, *Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan*, (Kediri: FAM Publishing), Maret 2019, hlm 8-10.

kelompok yang masih memiliki keterbatasan melalui berbagai tindakan dan strategi.

Dalam perspektif Islam, konsep pemberdayaan masyarakat juga sejalan dengan nilai tolong-menolong dalam kebaikan. Allah Swt. berfirman dalam {QS. Al-Maidah (5): (2)}.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya; "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya." {QS. Al-Maidah (5) : (2)}²³

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap individu dianjurkan untuk saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Hal ini juga diperkuat oleh hadis Nabi yang menyatakan:

وَحَيْرُ النَّاسِ أَنْفُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." (HR. Ath-

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kemenag RI, tahun terbit), QS. Al-Ma'idah 5:2.

Thabrani)²⁴

Dapat dipahami pemberdayaan adalah sebagai konsep sosial, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai keislaman yang menekankan pentingnya kepedulian dan kebermanfaatan bagi sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks penelitian ini, konsep pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dikaitkan dengan program Beasiswa Orang Tua Asuh. Program ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan pendidikan, tetapi juga menjadi bentuk upaya peningkatan kapasitas dan dukungan bagi penerima manfaat. Melalui program ini, diharapkan penerima beasiswa dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya serta memiliki kesempatan untuk berkembang secara lebih mandiri.

²⁴ Ahyat Halimi dan Ahmad Mohammad Tidjani, " The Role of Hadith in Character and Moral Formation," *Aqriri: Journal of Al-Hadith Science Studies*, Volume 1, (Desember 2025), hlm 199.

2. Model pemberdayaan

Dalam memahami konsep pemberdayaan masyarakat, Jack Rothman dikutip Zahra mengemukakan tiga model utama, yaitu sebagai berikut:²⁵

a. Pemberdayaan Masyarakat Lokal (*Locality Development*)

Model ini menekankan pada pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi melalui keterlibatan aktif serta inisiatif yang muncul dari masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap komunitas memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan dioptimalkan melalui partisipasi warga secara langsung.

b. Perencanaan Sosial (*Social Planning*)

Model ini berorientasi pada pemecahan berbagai permasalahan sosial yang dialami masyarakat.

Selain itu, pendekatan ini juga digunakan dalam proses

²⁵ Nur Fhadilah Zahra dkk, "Peran Strategis Motivasi dan Pemberdayaan SDM dalam Manajemen Organisasi: Tinjauan Teoritis," *Agility: Lentera Manajemen Sumber Daya Manusia*, Volume 03, (Agustus 2025), hlm 122.

pengambilan keputusan terhadap isu-isu seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan pengangguran dengan tujuan menghasilkan solusi yang lebih terarah dan sistematis.

c. Aksi Sosial (*Social Action*)

Model aksi sosial bertujuan untuk mendorong perubahan mendasar terhadap struktur sosial, organisasi, maupun lembaga melalui redistribusi kekuasaan, sumber daya, dan proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini berangkat dari pandangan bahwa masyarakat sering berada pada posisi yang dirugikan akibat ketimpangan struktural. Kemiskinan dan rendahnya daya saing masyarakat dipandang sebagai dampak dari dominasi kelompok elit yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, aksi sosial diarahkan pada proses penyadaran, pengorganisasian masyarakat, serta tindakan kolektif untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih mencerminkan prinsip demokrasi, kesetaraan dan keadilan.

F. Teori *Fundraising*

1. Definisi *Fundraising*

Fundraising adalah kegiatan penggalangan dana dan sumber daya lain, baik dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan, maupun pemerintah, yang digunakan untuk mendukung pencapaian misi atau tujuan suatu lembaga.²⁶ Arifin, *Fundraising* merupakan proses untuk mempengaruhi masyarakat agar berpartisipasi dalam memberikan dukungan finansial atau sumber daya bagi kegiatan atau program yang dijalankan oleh lembaga.²⁷ Menurut Fathurrohman, karim, dan Najib, *Fundraising* merupakan suatu proses atau aktivitas penghimpunan dana serta sumber daya pendukung lainnya yang diperoleh dari masyarakat, baik individu, kelompok, lembaga, maupun perusahaan.²⁸

²⁶ Salsabila Tiraliana dkk, "Strategi *Fundraising* Pengelolaan Zakat Dalam Menjalankan Program Jangka Panjang Dan Jangka Pendek," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 8, (Mei 2023), hlm 3794.

²⁷ Moh.Arifin, "Strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah (zis) di masa pandemic covid-19," *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, Volume 2, (Desember 2021), hlm 244.

²⁸ Muhammad Khaeru Fathurrohman dkk, "Strategi *Fundraising* dalam Mengoptimalkan Jumlah Penerimaan Zakat pada LAZ Harapan Dhuafa di

Adapun inti dari beberapa definisi tersebut bahwa *fundraising* merupakan proses atau kegiatan penggalangan dana dan sumber daya lain dari masyarakat, baik individu, kelompok, lembaga, perusahaan, maupun pemerintah, yang bertujuan untuk mendukung pencapaian misi atau tujuan suatu lembaga.

2. Metode *Fundraising*

Secara umum dalam penelitian ilham bahwa metode fundraising dibagi menjadi dua jenis yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*).²⁹

a. *Direct Fundraising*

Fundraising langsung (*direct fundraising*) adalah metode yang menggunakan teknik atau pendekatan yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. *Direct fundraising* menekankan pada hubungan personal dan kampanye yang bersifat

Kota Serang,” *JOIPAD: Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol 5, No 1, (Juni 2025), hlm 85.

²⁹ Muhammad Satriana Ilham, “Fundraising Zakat Ditinjau Dari Filsafat Ekonomi Islam (Landasan Ontologi, Epistemologis, dan Aksiologis) Filsafat Ilmu,” *TIJARAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 3, No 1, (Januari 2024), hlm 4.

spesifik. Contoh praktik dari metode ini antara lain *direct mail* (surat permohonan donasi), *direct advertising* (iklan langsung), *telefundraising* (penggalangan dana melalui telepon), dan presentasi langsung di lapangan atau melalui event khusus.

b. *Indirect Fundraising*

Fundraising tidak langsung (*indirect fundraising*) adalah metode yang dilakukan tanpa interaksi langsung dengan donatur. *Indirect fundraising* lebih menekankan pada promosi, edukasi, dan pembentukan hubungan jangka panjang dengan masyarakat atau calon donatur. Contoh praktik dari metode ini antara lain *advertorial* (artikel promosi), *image campaign* (kampanye citra), penyelenggaraan event melalui perantara, menjalin relasi melalui referensi, dan mediasi melalui pihak ketiga.